

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Oleh : Harry Purwanto, SH.

Pendahuluan

Sudah sejak berabad-abad yang lalu manusia mengenal betapa pentingnya wilayah laut. Sehingga tidak mengherankan bila akhirnya banyak negara mengklaim di bawah kekuasaannya wilayah laut yang berbatasan dengan negaranya.

Menurut bangsa Romawi, laut merupakan suatu "res communis omnium" (hak bersama seluruh umat). Menurut konsep ini penggunaan laut, bebas dan terbuka bagi setiap orang (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 : 3). Kemudian Grotius dalam bukunya *Mare Liberum*, mengemukakan adanya asas "freedom of the seas".

Yang melatarbelakangi negara untuk menguasai wilayah laut antara lain : (a). perlindungan kesehatan, (b). bea cukai; (c). pertahanan keamanan; (d). melindungi sumber kekayaan laut (e). kepentingan pelayaran; (f) sarana komunikasi.

Laut bila ditinjau secara horizontal dapat dibedakan antara :

1. Internal waters, yaitu perairan yang terletak di sebelah pantai dari garis dasar, yang diguna-

kan untuk mengukur lebar laut wilayah. Di wilayah ini negara pantai mempunyai kedaulatan yang mutlak.

2. Laut wilayah : yaitu jalur laut yang terletak di sebelah luar dari perairan pedalaman. Di laut wilayah ini negara pantai melaksanakan dan mempunyai kedaulatan territorial yang mutlak, baik atas airnya, tanah bawahnya, kekayaan alamnya maupun atas udara di atasnya. Lebar laut wilayah menurut pasal 3 Konvensi Hukum Laut PBB III tahun 1982 (KHL PBB III - 1982) adalah tidak melebihi 12 mil laut.

3. Laut lepas, yang terdiri atas :

a. Jalur tambahan (contiguous Zone) : adalah bagian laut bebas yang berbatasan dengan laut wilayah, yang lebarnya tidak boleh lebih dari 24 mil laut, yang diukur dari mana lebar laut wilayah diukur.

Di jalur tambahan ini negara pantai dapat melaksanakan pengawasan, antara lain :

(1) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal,

imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut territorialnya;

- (2) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut territorialnya. (pasal 33 KHL PBB-III-1982).

b. **Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)** : adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut wilayah, yang tunduk pada rezim hukum khusus. Lebar ZEE tidak boleh lebih 200 mil laut, yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. (pasal 57 KHL PBB III-1982).

Dari penggolongan yang demikian itu yang ingin ditinjau lebih lanjut adalah mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Lahirnya Rezim ZEE

Suatu negara dapat membuat pernyataan sepihak tentang segala sesuatu untuk kepentingan negara tersebut. Pernyataan sepihak dari negara tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat masyarakat Internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional, baik yang tertulis (Treaty) maupun hukum internasional kebiasaan.

Seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat pada

tahun 1945, tepatnya pada tanggal 28 September 1945, Presiden Amerika Serikat Harry S Truman mengeluarkan proklamasi Nomor : 2667 tentang Landas Kontinen dan No. 2668 tentang Perikanan. Dengan keluarnya dua proklamasi tersebut maka terjadi perubahan yang besar tentang status lautan, khususnya sangat melatar belakangi dan mewarnai timbulnya perkembangan rezim ZEE selebar 200 mil laut.

Lahirnya rezim ZEE dalam hukum laut (publik) internasional ini merupakan perkembangan baru dalam rangka melindungi sumber hayati di laut oleh negara pantai.

Segera setelah proklamasi tersebut, banyak negara mengajukan tuntutan atas kekayaan sumber alam di laut lepas yang bersangkutan dengan pantainya. Tuntutan tersebut berupa Deklarasi sepihak yang berkembang dengan pesat, terutama dimulai oleh negara-negara Amerika Latin (Peru, Mexico, Chili, Argentina dsb.). Seperti yang dikemukakan oleh Winston C.E. bahwa : "negara-negara Amerika Latin dalam mengajukan tuntutannya itu telah mengemukakan beberapa argumentasi yang bertujuan untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam yang banyak terdapat di perairan sejauh 200 mil, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya". (G. Kartasapoetra, RG. Kartasaputra, SH, 1984 : 116).

Tuntutan negara-negara berkembang terus, hingga pada tahun

1952 lahirlah Deklarasi Santiago yang ditanda tangani oleh Chili, Ekuador dan Peru, yang pada prinsipnya ketiga negara tersebut menuntut pelaksanaan yurisdiksi eksklusif terhadap sumber-sumber kekayaan alam, baik sumber hayati maupun non hayati yang terdapat di perairannya dan yang berkaitan dengan perairannya sejauh 200 mil.

Negara pantai dalam memperjuangkan hak-haknya untuk memelihara kekayaan alam sepanjang pantainya, khususnya negara-negara berkembang telah mengajukan beberapa cara dan konsepsi, yang antara lain :

1. Konsepsi "territorialist" yang meluaskan laut wilayahnya sampai 200 mil ke laut. Menurut konsepsi ini yang dituntut tidak hanya kekayaan alamnya saja, tetapi sekaligus menguasai laut tersebut sebagai wilayahnya. Konsepsi ini dianut oleh negara-negara antara lain Peru, El Savador, Equador, Brazil, Panama dsb.
2. Konsepsi "Economic Zone" (Economist), yang ingin memperluas hak berdaulat mereka ke laut sampai 200 mil dari garis dasar guna menguasai kekayaan alamnya baik di air (water column) dasar laut (seabed) serta tanah bawahnya (subsoil), demikian juga untuk kepentingan perlindungan dan penelitiannya. Menurut konsepsi ini tidak menuntut kedaulatan wilayah atas zone ekonomi yang 200

mil itu, tetapi hanya hak berdaulat atas kekayaan alamnya, serta yang berhubungan dengan kekayaan alam tersebut.

3. Konsepsi "Patrimonial Sea" (patrimonialist) yang ingin mempertahankan laut wilayah 12 mil dan juga menginginkan diakuinya sovereign rights negara pantai atas kekayaan alam di sepanjang pantainya sampai sejauh 200 mil dari garis dasar, baik di air, dasar laut maupun tanah bawahnya. Konsepsi "Patrimonialist" ini hampir sama dengan Konsepsi "Economist", yaitu sama-sama menginginkan diakuinya sovereign rights negara pantai atas kekayaan alam sejauh 200 mil. Perbedaannya, kalau pada konsepsi "economist" ingin menghilangkan konsepsi Landas Kontinen. Sedangkan pada konsepsi "patrimonialist" tetap mempertahankan konsepsi Landas Kontinen.
4. Konsepsi "Wilayah Perikanan" yang ingin menetapkan wilayah-wilayah perikanan tertentu di luar batas laut wilayah 12 mil. Konsepsi ini tidak begitu sering disebut, karena pada dasarnya telah tercakup di dalam ketiga konsepsi tersebut di atas.
5. Konsepsi "archipelagic states" (archipelagist) yaitu ingin mengamankan kekayaan alam di perairan kepulauan (archipelagic waters), di samping untuk memelihara kesatuan

bangsa dan kestabilan Negara.
(Hasjim Djalal, 1979 : 104-105).

Kemudian pada tahun 1958 diadakan Konperensi Hukum Laut Pertama di Jenewa, yang menghasilkan 4 buah Konvensi mengenai Hukum Laut Internasional, yaitu :

- I. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone.
- II. Convention on the High Seas
- III. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the high Seas.
- IV. Convention on the Continental Shelf.

Dalam Konvensi Jenewa 1958 tersebut belum mengatur tentang hak berdaulat negara pantai atas sumber kekayaan alam di laut sejauh 200 mil, namun sudah ada tanda-tanda atau bibit-bibit pengaturannya mengenai kekuasaan negara pantai atas perlindungan perikanan dan kekayaan hayati di laut lepas yang berbatasan dengan laut wilayahnya. Seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 bahwa : negara pantai mempunyai kepentingan khusus (special interest) dalam memelihara produktivitas dari sumber hayati di suatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut wilayahnya. (pasal 6 ayat 1 Konvensi III, Konvensi Jenewa 1958).

Keadaan yang demikian itu berlangsung terus, jumlah negara yang melakukan tuntutan atas hak berdaulat atas sumber kekayaan

alam di laut bebas yang berbatasan dengan laut wilayahnya sejauh 200 mil semakin meningkat, sementara belum ada aturannya yang tegas. Di tahun 1979 tidak lebih dari 133 negara pantai, di mana 92 mengklaim hak perikanan eksklusif sejauh 200 mil (14 negara mengklaim laut wilayah sejauh 200 mil, 45 negara mengklaim zone ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dan 33 negara mengklaim zone perikanan eksklusif sejauh 200 mil); kira-kira 17 negara yang lain mengklaim laut wilayah, zone penangkapan ikan dan zone ekonomi eksklusif lebih dari 12 mil tetapi kurang dari 200 mil. (Akehurst, Michael 1982 : 271).

Pengertian dan Status hukum ZEE

Keadaan seperti tersebut di atas berjalan terus melalui hukum kebiasaan internasional, hingga tahun 1982. Di mana pada akhir tahun 1982 lahirlah Konvensi Hukum Laut III yang diprakasai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada saat berlangsungnya KHL III, yang menjadi persoalan pokok antara lain status hukum ZEE tersebut. Pada waktu itu ada dua pendapat yaitu : (a) apakah zone tersebut merupakan bagian dari laut bebas ataukah (b). zone tersebut mempunyai status hukum (rezim hukum) tersendiri.

Menurut negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, USSR,

Jepang dan Jerman Barat bahwa ZEE itu harus merupakan laut bebas (mareliberium) dengan ketentuan : negara pantai hanya diberi kewenangan tertentu, sepanjang yang berhubungan dengan kekayaan alamnya. Oleh karenanya penggunaan laut bebas seperti untuk keperluan militer tetap harus bebas bagi semua bangsa.

Sedangkan negara pantai yang sedang berkembang menolak dipertahankannya status laut bebas bagi ZEE, walaupun mengakui beberapa hak laut bebas dengan ketentuan hak-hak tersebut harus diperinci dengan jelas. Negara-negara pantai sedang berkembang ini tetap gigih mempertahankan bahwa konsep ZEE merupakan suatu konsepsi yang berdiri sendiri atau sui generis. (Hasjim Djalal 1979 : 108 - 109).

Dari pertentangan tersebut akhirnya KHL III 1982 berhasil merumuskan pengertian dan status hukum dari ZEE, seperti yang tercantum dalam pasal 55 jo. 57 KHL III - 1982.

Pasal 55 : Zone Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam *Bab ini* berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini.

Pasal 57 : Zone Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis dasar (base-lines) dari mana lebar laut territorial diukur.

Dengan berpegangan pada dua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ZEE itu adalah suatu daerah di sisi luar dan berdampingan (adjacent) dengan laut territorial, yang lebarnya tidak boleh lebih dari 200 mil laut, yang diukur dari garis dasar dari mana lebar laut territorial diukur.

Mengenai status hukumnya adalah tunduk pada rezim hukum khusus (specific legal regime) artinya walaupun zone tersebut merupakan bagian dari laut bebas, namun kebebasan dari negara lain yang akan menggunakan zone tersebut, dibatasi oleh hak-hak yang dimiliki oleh negara pantai atau kepentingan negara pantai. Dengan kata lain yang berlaku di ZEE tersebut adalah unsur-unsurnya saja dari "freedom of the high seas". (Adi Sumardiman : 46).

Hak dan Kewajiban Negara Pantai

Di ZEE negara pantai tidak mempunyai kedaulatan atas wilayah, sebagaimana di laut wilayah, karena memang tidak dimaksudkan untuk menuntut atas kedaulatan wilayah selebar 200 mil. Namun yang dituntut adalah kedaulatan atas kekayaan sumber hayati atau kekayaan alamnya di wilayah selebar 200 mil tersebut.

Hak-hak negara pantai di ZEE antara lain :

1. Hak berdaulat untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik yang hayati maupun non hayati, di perairan di atas dasar laut, di dasar laut dan tanah bawahnya, serta kepentingan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi di ZEE, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
2. hak eksklusif untuk membangun dan mengatur penggunaan pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan untuk kepentingan ekonomi;
3. hak untuk menjalankan yurisdiksi atas pulau buatan, instalasi dan bangunan serta yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundangan bea cukai, fiskal, kesehatan dan imigrasi;
4. berhak untuk menetapkan zona keselamatan di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan, demi menjamin keselamatan pelayaran atau keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan;
5. berhak menetapkan terlebih dahulu kapasitas jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat dikelolanya;
6. dalam menjalankan yurisdiksinya negara pantai berhak untuk mengambil tindakan sedemikian rupa, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan

melakukan proses peradilan demi ditaatinya peraturan perundangan yang ditetapkan;

7. hak pengejaran seketika (Hot Pursuit) terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran;

Adapun yang menjadi kewajiban negara pantai antara lain :

1. Dalam melaksanakan haknya, negara pantai berkewajiban untuk memperhatikan atau menghormati hak-hak negara lain di Zona tersebut, seperti kebebasan berlayar, melakukan penerbangan di atasnya, penempatan kabel, pipa-pipa, mendirikan bangunan dan sebagainya;
2. memberitahukan sebagaimana mestinya mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan;
3. menentukan dan memberitahukan jumlah surplus hasil sumber hayati di ZEE negara pantai yang boleh dinikmati oleh negara lain;
4. menyumbangkan dan menukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang, tentang keterangan ilmiah, statistik penangkapan, usaha-usaha perikanan dan data lainnya yang relevan;
5. memberitahukan sebagaimana mestinya mengenai peraturan Konservasi dan pengelolaan.
6. mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar ko-

ordinat geografi dan menyampaikan satu copy setiap peta dan daftar tersebut kepada Sekretaris Jendral PBB;

7. menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain sebagaimana ditentukan dalam KHL PBB III-1982.

Hak negara lain di ZEE

Seperti disebutkan di muka, bahwa wilayah ZEE merupakan bagian dari laut lepas, pada dasarnya hak eksklusif itu meliputi sumber-sumber ekonomi atau sumber kekayaan hayati. Sehingga negara lain tetap menikmati hak kebebasan tertentu di ZEE tersebut. Seperti dikemukakan oleh Brownlie bahwa : "Essentially the zone involves exclusive rights to economic resources with ancillary powers relating to control of pollution and other matters, without prejudice to freedom of navigation and overflight". (Ian Brownlie; 1979 : 221).

Hak negara lain di ZEE antara lain :

- kebebasan untuk berlayar;
- kebebasan untuk melakukan penerbangan;
- kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut
- untuk turut serta melakukan eksploitasi atas kelebihan sumber kekayaan hayati di ZEE negara pantai yang dibolehkan,
- serta penggunaan laut lain yang syah menurut HI, seperti

pengoperasian kapal, pesawat udara dan sebagainya (pasal 58 KHL PBB-III-1982).

Negara lain dalam melaksanakan haknya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai, ketentuan-ketentuan hukum internasional serta memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara pantai.

Hak Negara tak berpantai dan Negara yang secara geografis tak beruntung

Bagi Negara Tak Berpantai (land locked states = LLS) dan Negara yang secara Geografis tak beruntung (Geographically Disadvantaged States = GDS) mempunyai hak untuk berperan serta dalam eksploitasi dari kelebihan sumber kekayaan hayati ZEE negara pantai, baik dalam sub regional atau regional dengan suatu perjanjian atas dasar keadilan dan dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis.

Perjanjian yang diadakan oleh LLS atau DGS dengan negara pantai tersebut bisa bersifat bilateral, sub regional atau regional, dengan mengingat :

- a. kebutuhan, yang jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan negara pantai;
- b. sejauh mana peran serta LLS atau DGS dalam mengeksploata-

si sumber kekayaan hayati di ZEE tersebut;

- c. sejauh mana peran serta LLS atau DGS lainnya dalam mengeksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE tersebut, serta kebutuhan yang timbul untuk menghindari beban khusus negara pantai tersebut;
- d. kebutuhan gizi penduduk masing-masing.

Prinsip umum yang berlaku dalam perjanjian internasional bahwa : hak kewajiban treaty itu tidak dapat dialih tangankan. Terhadap prinsip umum tersebut ternyata ada pengecualiannya yaitu :

1. melalui Novasi;
2. treaty yang bersangkutan secara terang-terangan atau tidak, membolehkan;
3. terhadap hutang yang liquidated atau claim yang timbul dari treaty, sepanjang tidak merugikan debitur. (J.G. Starke, 1977 : 470).

Demikian juga terhadap hak peran serta dari LLS atau DGS tersebut di atas, yang lahir dari perjanjian yang diadakan di antaranya, prinsipnya juga tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun di sinipun ada pengecualiannya, yaitu apabila para pihak menyetujuinya terjadinya peralihan tersebut.

Dan prinsip tersebut tidak berlaku bila LLS atau DGS tersebut ternyata memperoleh bantuan teknis atau keuangan dari pihak ketiga untuk memudahkan pelaksanaan haknya, sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan hak.

Penetapan batas ZEE yang berdampingan atau berhadapan

Seperti kita ketahui bersama, bahwa sering terjadi wilayah suatu negara saling berdampingan atau berhadapan dengan wilayah negara lain dan bahkan terjadi tumpang tindih. Oleh karenanya dalam menentukan batas mana yang berada di bawah kedaulatan suatu negara diperlukan suatu persetujuan di antaranya.

Demikian juga sering terjadi pada wilayah ZEE suatu negara pantai saling tumpang tindih dengan ZEE negara pantai yang saling berdampingan atau saling berhadapan. Hal ini terjadi karena prinsipnya semua negara pantai menuntut wilayah ZEE selebar 200 mil laut, seperti yang ditentukan dalam pasal 57 KHL III - 1982.

Penetapan batas ZEE antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. (pasal 74 ayat 1 KHL PBB III - 1982).

Jadi pasal 74 ayat 1 tersebut menghendaki dalam menyelesaikan batas-batas ZEE dari negara pantai dilakukan atas dasar dan di bawah hukum internasional yang berlaku/ada. Adapun dasar hukum internasional yang ditunjuk adalah seperti yang termuat dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 38 Statuta MI itu terdiri dari dua ayat, yang menunjuk macam-macam ketentuan hukum internasional yang digunakan oleh Mahkamah Internasional sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan pada Mahkamah Internasional. Adapun macam ketentuan tersebut adalah :

1. perjanjian internasional (treaties), baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
2. kebiasaan internasional (international custom) yang terbukti dalam praktek dan diterima sebagai hukum;
3. asas-asas hukum umum (the general principles of law);
4. keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang tercapak di berbagai negara (pasal 38 ayat 1 Statuta MI).

Sedangkan ayat duanya berbunyi : "bahwa ketentuan ini tidak mempengaruhi kekuasaan hakim untuk memutuskan suatu perkara ex aequo et bono (kepatutan dan kepatutan), bila para pihak menyetujuinya.

Selanjutnya, apabila persetujuan (sebagaimana dimaksud pasal 74 ayat 1) belum dicapai, maka negara-negara tersebut harus melakukan suatu usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dengan semangat saling pengertian dan kerja sama. Namun pengaturan yang bersifat sementara ini tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan. (pasal 74 ayat 2 dan 3 KHL PBB III - 1982).

Demikian sedikit gambaran tentang ZEE, yang lahir, tumbuh dan berkembang melalui Hukum Kebiasaan Internasional, yang akhirnya dewasa ini mendapat pengaturan yang tegas dalam Konvensi Hukum Laut PBB III (Third United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982.

DAFTAR PUSTAKA

1. Akehurst, Michael, *A Modern Introduction to International Law* George Allen and Unwin, London, fourth edition, 1982.
2. Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, Third edition, 1979.
3. Hasjim Djalal, DR., *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, BPHN, Binacipta, Bandung, 1979.

4. Kartasapoetra, G & Kartasapoetra, RG, SH, *Indonesia dalam Lingkaran Hukum Internasional*, Sumur Bandung, 1984.
5. Mochtar Kusumaatmadja, Prof. DR, SH, LLM, *Hukum Laut Internasional*, BPHN, Binacipta, Bandung, 1983.
6. Starke, JG, *An Introduction to International Law*, Butterworths, London, Eighth Edition, 1977.
7. Sumardiman Adi, Kol Laut, Ir. SH, *Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia*, MABES ABRI LEMHANNAS.
8. ———— *Geneva Convention on The Law of The Sea 1958*.
9. ———— *Third United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*.
10. ————, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, DEPARLU, DIREKTORAT PERJANJIAN INTERNASIONAL.